

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

_____, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Friedman, Lawrance M., 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Fuady, Munir, 2005, *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta.

Poerwadaminta, W.J.S., 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Balai Pustaka*, Jakarta.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1993, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, 1993, Jakarta.

Winardi, 2000, *Pengawasan Dalam Organisasi Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Tesis

Listantri, Enggar, “Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Rangka Upaya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Bogor”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Permatasari, Mahdiati Fauziah, “Peranan Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Triastuti, Friska Dewi, “Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah Di Kabupaten Temanggung”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Perubahan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

D. Internet

Bantuan Hukum Notaris, “Sejarah Notaris di Indonesia”, <http://bantuanhukumnotariat.blogspot.co.id>, diakses tanggal 12 September 2020.

Ikatan Notaris Indonesia, “Sejarah INI”, <https://ini.id/sejarah-ini>, diakses pada tanggal 19 November 2020.